



**RANCANGAN
RENCANA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU**

TAHUN 2023



INSPEKTORAT DAERAH

**Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2022**

K A T A P E N G A N T A R

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 dapat tersusun.

Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 ini disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023, untuk menjalankan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen ini memuat tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu beserta indikatornya, program dan kegiatan, serta target kinerja dan pagu indikatif program / kegiatan. Renja ini selanjutnya akan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebelum disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2023.

Kami menyadari bahwa Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 ini belum sempurna, untuk itu kami mohon masukan dan koreksi dari semua pihak. Selanjutnya diharapkan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu ini dapat diimplementasikan dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Batulicin, 04 Juli 2022
Inspektur,

Ir. H. Riduan
Pembina Utama Muda
NIP. 19630727 199203 1 007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN LALU	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	23
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	32
2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD	35
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	45
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU	46
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	46
3.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan.....	51
3.3. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	53
BAB VI. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU	55
BAB V. PENUTUP	63

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2022	12
Tabel 2.2.	Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sampai dengan Tahun 2022	24
Tabel 2.3.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sampai dengan Tahun 2022	30
Tabel 2.4.	Review terhadap Rancangan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu ...	37
Tabel 2.5.	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023	45
Tabel 3.1.	Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023.....	54
Tabel 4.1.	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka (Inspektorat Daerah) Kabupaten Tanah Bumbu sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu Tahun 2023 juga mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023. Dimana penyusunan Renja dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD; dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Inspektorat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya, serta evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Inspektorat Daerah, termasuk evaluasi terhadap output pada Renja Tahun 2021 yang terdampak pandemi COVID-19.

Selanjutnya Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127)
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
 13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembuatan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

- Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan BPKP Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi pada Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 419)
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 3);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5 Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan (5-33/2021));
28. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);
29. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 26);
30. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 9);
31. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 62 Tahun 2022 tentang Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 62);
32. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penetapan Renja SKPD Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 66);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Inspektorat

- Daerah Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2023;
 - c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, analisis kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, review terhadap Rancangan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu pada Tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 dan Tahun 2022. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sampai dengan Tahun 2023.

A. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2022 Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Pada tahun 2021 Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan 3 (Tiga) Program dan 9 (Sembilan Kegiatan) Kegiatan serta 30 (Tiga Puluh) Sub Kegiatan, sebagaimana tercantum pada Perubahan Renja Tahun 2021. Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan tersebut sebagai berikut :

1) **Program Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**

Indikator Kinerja Outcome pada Program ini adalah “Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah” dengan Target Tahun 2021 sebesar 100% dan Realisasi sebesar 100% (Capaian 100%).

Pada Program ini terdapat 6 (Enam) Kegiatan dan 17 Sub Kegiatan, di mana Target Indikator Kinerja dari Kegiatan :

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Target Tahun 2021 sebesar 100% dan Realisasi sebesar 100% (Capaian 100%).
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Target Tahun 2021 sebesar 100% dan Realisasi sebesar 99% (Capaian 99,07%).
3. Adminitrasi Umum Perangkat Daerah Target Tahun 2021 sebesar 100% dan Realisasi sebesar 99% (Capaian 98,56%).
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Target Tahun 2021 sebesar 100% dan Realisasi sebesar 100% (Capaian 100%).
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Target Tahun 2021 sebesar 100% dan Realisasi sebesar 100% (Capaian 100%).
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerihan Daerah Target Tahun 2021 sebesar 100% dan Realisasi sebesar 100% (Capaian 100%).

2) **Program Penyelenggaraan Pengawasan**

Indikator Kinerja Outcome pada Program ini adalah “**Persentase Rekomendase LHP yang ditindaklanjuti**” dengan Target Tahun 2021 sebesar 100% dan Realisasi sebesar 100% (Capaian 100%).

Pada Program ini terdapat 2 (Dua) Kegiatan dan 9 (Sembilan) Sub Kegiatan, di mana Target Indikator Kinerja dari Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal Target Tahun 2021 sebesar 100% dan Realisasi sebesar 100% (Capaian 100%).
2. Penyelenggaran Pengawasan dengan Tujuab Tertentu Target Tahun 2021 sebesar 100% dan Realisasi sebesar 100% (Capaian 100%).

3) **Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**

Indikator Kinerja Outcome pada Program ini adalah “**Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Bidang Penguatan Pengawasan**” dengan Target Tahun 2021 Indeks 2.6 dan Realisasi sebesar Indeks 2,6 (Capaian 100 %).

Pada Program ini terdapat 1 (Satu) Kegiatan dan 4 (Empat) Sub Kegiatan, di mana Target Indikator Kinerja dari Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Target Tahun 2021 sebesar 100% dan Realisasi sebesar 100% (Capaian 100%).

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2021 dan perkiraan capaian target Renstra sampai dengan Tahun 2022 Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tersaji dalam Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2022
Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (Target akhir Renstra)	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Capaian Realisasi Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi (%)		Realisasi Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6.01	Urusan Pengawasan									
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah	100 Indeks		100 Indeks	87,86 Indeks	87,86	100 Indeks	Indeks	
6.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terselenggara dengan baik	100 %		100 %	100 %	100	100 %	%	
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	6 Bulan	
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/bln		- Orang	- Orang		- Orang	- Orang	
6.01.02.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Ketersediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	6 Bulan	
6.01.02.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7 dokumen		12 dokumen	12 dokumen	100	12 dokumen	dokumen	
6.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administasi dan Disiplin Pegawai Perangkat Daerah	100 %		100 %	99,07 %	99,07	100 %	%	
6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang tersedia	77 Stell		65 Stell	65 Stell	65	68 Stell	Stell	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (Target akhir Renstra)	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Capaian Realisasi Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi (%)		Realisasi Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	74 Paket		- Paket	- Paket		- Paket	- Paket	
6.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1	1 Dokumen	1 Dokumen	
6.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen		- Dokumen	- Dokumen		- Dokumen	- Dokumen	
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	135 Orang		60 Orang	55 Orang	91,67	60 Orang	10 Orang	
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang		- Orang	- Orang		- Orang	- Orang	
6.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		100 %	98,56 %	98,56	100 %	%	
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	340 Paket		310 Paket	310 Paket	100	323 Paket	323 Paket	
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket		- Paket	- Paket		- Paket	- Paket	
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	55 Unit		55 Unit	55 Unit	100	55 Unit	- Unit	
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan			- Paket	- Paket		- Paket	- Paket	
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100	121 Bulan	6 Bulan	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (Target akhir Renstra)	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Capaian Realisasi Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi (%)		Realisasi Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	9 Paket		- Paket	- Paket		- Paket	- Paket	
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	3 Bulan	
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket		- Paket	- Paket		- Paket	- Paket	
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	24 Eksemplar		24 Eksemplar	24 Eksemplar	100	24 Eksemplar	9 Eksemplar	
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	24 Dokumen		- Dokumen	- Dokumen		- Dokumen	- Dokumen	
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	323 Kali		291 Kali	291 Kali	100	302 Kali	108 Kali	
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	310 Laporan		- Laporan	- Laporan		- Laporan	- Laporan	
6.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD		1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	
6.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatasahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Paket		- Paket	- Paket		- Paket	- Paket	
6.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %		100 %	100 %	100	100 %	%	
6.01.01.2.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	6 Unit		- Unit	- Unit	-	- Unit	Unit	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (Target akhir Renstra)	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Capaian Realisasi Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi (%)		Realisasi Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6.01.01.2.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Diana Operasional atau Lapangan yang disediakan	1 Unit		- Unit	- Unit	-	- Unit	Unit	
6.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun	3 Unit		2 Unit	2 Unit	100	- Unit	Unit	
6.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Paket		- Paket	- Paket		- Paket	- Paket	
6.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100 %		100 %	100 %	100	100 %	%	
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	6 Bulan	
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 Laporan		- Laporan	- Laporan		- Laporan	- Laporan	
6.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	6 Bulan	
6.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Laporan		- Laporan	- Laporan		- Laporan	- Laporan	
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	6 Bulan	
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan		- Laporan	- Laporan		- Laporan	- Laporan	
6.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100 %		100 %	99,57 %	99,57	100 %	%	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (Target akhir Renstra)	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Capaian Realisasi Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi (%)		Realisasi Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	6 Bulan	
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		- Unit	- Unit		- Unit	- Unit	
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terdapat/terpelihara*) (unit)	2 Unit		2 Unit	2 Unit	100	- Unit	Unit	
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 Unit		- Unit	- Unit		- Unit	- Unit	
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase rekomendasi LHP yang ditindaklanjuti (%)	100 %		100 %	100 %	100	100 %	%	
6.01.02.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase laporan pengawasan internal yang diselesaikan	100 %		100 %	99,75 %	99,75	100 %	%	
6.01.02.2.01.01.	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengawasan kinerja Pemerintah Daerah	55 Laporan		47 Laporan	47 Laporan	100	49 Laporan	10 Laporan	
6.01.02.2.01.01.	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	51 Laporan		- Laporan	- Laporan		- Laporan	- Laporan	
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengawasan keuangan Pemerintah Daerah	57 Laporan		47 Laporan	47 Laporan	100	50 Laporan	15 Laporan	
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	52 Laporan		- Laporan	- Laporan		- Laporan	- Laporan	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (Target akhir Renstra)	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Capaian Realisasi Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi (%)		Realisasi Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Kinerja	6 Laporan		6 Laporan	2 Laporan	33,33	5 Laporan	1 Laporan	
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	5 Laporan		- Laporan	- Laporan		- Laporan	- Laporan	
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Keuangan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan		- Laporan	- Laporan		- Laporan	- Laporan	
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan pengawasan Desa	36 Laporan		36 Laporan	102 Laporan	283,33	36 Laporan	10 Laporan	
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	36 Laporan		- Laporan	- Laporan		- Laporan	- Laporan	
6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah laporan hasil kerjasama pengawasan internal	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	1 Laporan	
6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	2 Kesempatan		- Kesempatan	- Kesempatan		- Kesempatan	- Kesempatan	
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti	75 Dokumen		90 Dokumen	34 Dokumen	37,78	85 Dokumen	25 Dokumen	
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK-RI dan TLHP APIP	80 Dokumen		- Dokumen	- Dokumen		- Dokumen	- Dokumen	
6.01.02.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan pengawasan dengan tujuan tertentu yang diselesaikan	100 %		100 %	100 %	100	100 %	%	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (Target akhir Renstra)	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Capaian Realisasi Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi (%)		Realisasi Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6.01.02.2.02.01.	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	2 Laporan	
6.01.02.2.02.01.	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah yang ditangani	2 Laporan		- Laporan	- Laporan		- Laporan	- Laporan	
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan pengawasan dengan tujuan tertentu	39 Laporan		45 Laporan	2 Laporan	153,85	Laporan	19 Laporan	
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	39 Laporan		- Laporan	- Laporan		- Laporan	- Laporan	
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Indeks RB Bidang Penguatan Pengawasan (Bobot)	3 Bobot		2,6 Bobot	2,6 Bobot	100	2,7 Bobot	Bobot	
6.01.03.1.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	persentase kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang diterbitkan	100 %		100 %	- %	-	100 %	%	
6.01.03.1.01.01.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		1 Dokumen		- Dokumen	- Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	
6.01.03.1.01.01.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan teknis di bidang Pengawasan yang disusun	1 Rekomendasi		- Rekomendasi	- Rekomendasi		- Rekomendasi	- Rekomendasi	
6.01.03.2.02	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Persentase asistensi dan pendampingan yang dilaksanakan	100 %		100 %	100 %	100	100 %	%	
6.01.03.2.02.01.	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan		3 Laporan	2 Laporan	66,67	2 Laporan	2 Laporan	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (Target akhir Renstra)	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Capaian Realisasi Target Renstra s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi (%)		Realisasi Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6.01.03.2.02.01.	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	41 Perangkat Daerah		- Perangkat Daerah	- Perangkat Daerah		- Perangkat Daerah	- Perangkat Daerah	
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Laporan)	2 Laporan		2 Laporan	42 Laporan	210	2 Laporan	2 Laporan	
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	41 Perangkat Daerah		- Perangkat Daerah	- Perangkat Daerah		- Perangkat Daerah	- Perangkat Daerah	
6.01.03.2.02.03.	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3 Laporan		3 Laporan	6 Laporan	200	3 Laporan	3 Laporan	
6.01.03.2.02.03.	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	41 Kegiatan		- Kegiatan	- Kegiatan		- Kegiatan	- Kegiatan	
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laporan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1 Laporan		1 Laporan	45 Laporan	4500	1 Laporan	1 Laporan	
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	49 Perangkat Daerah		- Perangkat Daerah	- Perangkat Daerah		- Perangkat Daerah	- Perangkat Daerah	

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, 2021

Catatan :

- Baris warna hijau muda sesuai dengan indikator pada Kepmendagri 050 Tahun 2021.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Kinerja Program Yaitu Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Internal Perangkat Daerah, dimana pada Tahun 2021 ditarget sebesar 100. Adapun Realisasi pada saat pelaksanaan adalah sebesar 87,86 atau Tingkat Capaian sebesar 87,86 %. Target tersebut belum tercapai dikarenakan adanya unsur pelayanan yang belum terpenuhi. Adapun unsur pelayanan yang dinilai terdiri dari Kesesuaian persyaratan, Prosedur Pelayanan. Kecepatan Pelayanan, Kesesuaian/kewajaran biaya, Kesesuaian Pelayanan, Kompetensi Petugas, Perilaku Petugas Pelayanan, Penanganan Pengaduan dan Kualitas Sarana Prasarana.

Pada Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan Indikator Jumlah Pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi dimana target pada Tahun 2021 sebesar 60 Orang. Adapun Realisasi pada saat pelaksanaan sebesar 55 Orang atau Tingkat Capaian sebesar 91,67 %. Menurunnya capaian hasil dari yang ditargetkan dikarenakan Pandemi COVID-19, sehingga dari Pemerintahan Pusat atau Lembaga membatasi kuota peserta.

Pada Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja dengan Indikator Jumlah Laporan Reviu Laporan Kinerja, dimana pada Tahun 2021 ditargetkan 6 Laporan. Adapun Realisasi pada saat pelaksanaan yaitu 2 Laporan atau Tingkat Capaian 33,33 %. Hal ini dikarenakan kegiatan dilaksanakan berdasar Jadwal PKPT, yaitu Reviu LKJ Kabupaten dan Reviu LPPD Kabupaten.

Pada Sub Kegiatan Pengawasan Desa dengan Indikator Jumlah Laporan Pengawasan Desa, dimana pada Tahun 2021 ditargetkan sebanyak 36 Laporan. Adapun Realisasi pada saat pelaksanaan yaitu 102 Laporan atau Tingkat Capaian 283,33 %. Hal ini mengalami kenaikan yang signifikan disebabkan banyaknya pembinaan dan pengawasan yang harus dilakukan sesuai dengan Jadwal PKPT yang ditetapkan.

Pada Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

dengan Indikator Jumlah Temuan yang ditindaklanjuti, dimana pada Tahun 2021 ditargetkan sebanyak 90 Temuan. Adapun Realisasi pada saat pelaksanaan yaitu sebesar 34 Temuan atau Tingkat Capaian 37,38 %. Berkurangnya Tingkat Temuan disebabkan karena SKPD/Desa sudah mulai memahami hal-hal yang perlu disiapkan baik pada saat perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan dan pelaporan.

Pada Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dengan Indikator Jumlah laporan pengawasan dengan tujuan tertentu, dimana pada Tahun 2021 ditargetkan sebanyak 45 Laporan. Adapun Realisasi pada saat pelaksanaan yaitu 60 Laporan atau Tingkat Capaian 133,33 %. Meningkatnya capaian laporan tersebut disebabkan banyaknya pengawasan Mandatori yang dilakukan yaitu Audit Bansos COVID, Audit PBJ Pada Masa COVID, Audit Probitas, Audit Dana BOS, Verifikasi LHKASN, Audit Kepegawaian, Audit Kepatuhan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan, Audit Kepatuhan PBJ, Audit IT PBJ, Audit Penata Usahaan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT), Pemeriksaan DAK Fisik, Pemeriksaan Kasus.

Pada Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah dengan Indikator Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah, dimana pada Tahun 2021 ditargetkan sebanyak 3 Laporan. Adapun Realisasi pada saat pelaksanaan yaitu 2 Laporan atau Tingkat Capaian 66,67 %. Menurunnya capaian diakibatkan adanya 1 Laporan yang tidak dilaksanakan, yaitu Sosialisasi LHKASN, sedangkan 2 Laporan yang terealisasi adalah Bintek Pelaksanaan SPIP dan Sosialisasi Sentra Pengaduan Masyarakat.

Pada Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi dengan Indikator Jumlah Laporan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi, dimana pada Tahun 2021 ditargetkan sebanyak 2 laporan. Adapun Realisasi pada saat pelaksanaan adalah 42 Laporan atau Tingkat Capaian 2100%. Meningkat capaian disebabkan karena adanya 42 SKPD yang mengikuti Bintek Penilaian Reformasi Birokrasi dan dari 42 SKPD, ada 9 SKPD yang didampingi Pengawasan Reformasi Birokrasi. Hal ini dalam artian ada 2 Laporan yang telah dilaksanakan yakni

Bintek dan Pendampingan.

Pada Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan Indikator Jumlah Laporan Koordinasi. Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dimana pada Tahun 2021 ditargetkan sebanyak 3 Laporan. Adapun Realisasi pada saat pelaksanaan adalah sebesar 6 Laporan atau Tingkat Capaian 200 %. Meningkatnya capaian disebabkan karena adanya 3 kegiatan yang dilaksanakan selama 2 hari yaitu Korsupgah, Saberpungli, dan sosialisasi Gratifikasi.

Pada Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas dengan Indikator Jumlah Laporan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas, dimana pada Tahun 2021 ditargetkan sebanyak 1 Laporan. Adapun Realisasi pada saat pelaksanaan adalah 45 Laporan atau Tingkat Capaian 100 %. Meningkatnya capaian disebabkan adanya 45 Laporan SKPD yang aktif mengikuti Survey Penilaian Integritas (SPI) yang dilaksanakan dari Mandatori KPK.

B. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021.

Aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 (Satu) Urusan, 3 (Tiga) Program, 9 (Sembilan) Kegiatan dan 30 (Tiga Puluh) Sub Kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebesar Rp 13.686.339.638,00 Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp. 11.697.065.101,00 (85,47%) dengan sisa sebesar Rp. 1.989.274.537,00 (14,53%).

C. Hambatan dan Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Evaluasi, secara umum permasalahan yang dihadapi adalah :

- 1) Terdapat kegiatan-kegiatan yang dalam pencapaian target belum sesuai dengan yang diharapkan, hal ini terjadi karena dikarenakan

kegiatan-kegiatan tersebut tidak dapat diprediksi pelaksanaannya.

- 2) Realisasi Anggaran Perubahan yang sering tidak tepat waktu, sehingga kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat direalisasikan karena keterbatasan waktu dalam pertanggung jawabannya.

D. **Pemecahan Masalah**

Secara umum dalam usaha pencapaian sasaran ditetapkan strategi sebagai berikut :

- 1) Pagu Anggaran Anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya diharapkan dapat dialokasikan sesuai dengan Pagu Anggaran kegiatan yang diajukan, sehingga kegiatan dan besaran anggaran tersebut tidak mengalami perubahan anggaran karena ketidaksesuaian tersebut.
- 2) Diharapkan besaran Uang Persediaan (UP) persentasenya ditingkatkan, sehingga dapat memberikan kebebasan dalam merealisasikan kegiatan sesuai dengan kebutuhan anggaran kegiatannya.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

Penyelenggaraan pelayanan Inspektorat Daerah adalah melaksanakan fungsi sebagai unsur pembinaan dan pengawasan di Kabupaten Tanah Bumbu, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9).

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Sampai dengan Tahun 2021

NO.	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021
1.	Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani	Capaian Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2 (Skor : 2,718)
2.	Sasaran : 1. Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah 2. Meningkatnya Kinerja Pengawasa Internal	Predikat SAKIP	A	A	A	A	A	A	A (Angka Tertimbang 86,18)
		Persentase SKPD yang menerima Zone Integritas	7,14%	7,14%	7,14%	9,52%	9,52%	11,90%	16,07% (9 SKPD : 56 Termasuk 6 Puskesmas)
		Persentase SKPD dengan Nilai SAKIP Minimal A	16,67%	19,05%	21,43%	23,81%	26,19%	28,57%	15,00% (6 SKPD Nilai SAKIP A : 40 SKPD)
		Capaian Kapabilitas APIP (Aparatur Pengawas Internal Pemerintah)	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, 2021

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Tahun 2021 tersebut di atas adalah sebagai berikut

A. Tujuan *“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani sesuai peraturan perundang-undangan”*

B. Sasaran

1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator “Predikat SAKIP” telah mencapai target, dimana realisasinya mencapai Indeks A (capaian sebesar 100%);

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran ke 1 (satu) yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah dengan Indikator Sasaran predikat SAKIP. Pada tahun 2021 Tim APIP Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan Evaluasi Kinerja di jadwalkan pada bulan Maret 2021.

Evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu ini dilakukan dalam rangka memperoleh umpan balik yang lebih obyektif guna perbaikan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah di masa mendatang

Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terdiri dari evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi :

1. Perencanaan Kinerja;
2. Pengukuran Kinerja;
3. Pelaporan Kinerja;
4. Evaluasi Kinerja; dan
5. Pencapaian Kinerja.

2) Meningkatnya Kinerja Pengawasan Internal

terdapat 3 (tiga) indikator sasaran.

Adapun Indikator Sasaran 1 (satu) adalah presentase SKPD yang menerima zona Integritas.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Instansi Pemerintah, dimana pada tahun 2021 ditetapkan target sebanyak 2 (dua) SKPD yang menerapkan Zona

Integritas dan realisasi nya sebanyak 11 SKPD menuju Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Penilaian Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) meliputi:

- a. Progres reform pada 6 (enam) area perubahan dan sasaran dalam setiap area perubahan, yaitu:
 1. Manajemen Perubahan
 2. Penataan Tatalaksanaan
 3. Penataan Sistem Manajemen SDM
 4. Akuntabilitas
 5. Pengawasan
 6. Pelayanan Publik.
- b. Identifikasi dan mitigasi risiko integritas dalam pelaksanaan pelayanan pada unit kerja;
- c. Inovasi pada sektor pelayanan, kinerja dan penguatan integritas untuk mencegah KKN

Indikator “Persentase SKPD yang menerima Zone Integritas” telah mencapai target, dengan realisasi sebesar 100% (capaian sebesar 100 %);

Sasaran 2 (dua) ini yakni meningkatnya kinerja pengawasan internal dimaksudkan untuk mewujudkan administrasi/manajemen pemerintahan yang baik, dimana Indikator “Persentase SKPD yang mendapat Nilai SAKIP Minimal A” dengan target sebesar 16,67 %, dengan realisasi sebesar 15,00 % (capaian sebesar 89,98 %).

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran ke 2 (dua) yaitu Meningkatnya Kinerja pengawasan internal dengan Indikator Sasaran 2 (dua) yaitu : Persentase SKPD dengan Nilai SAKIP minimal A.

Pada tahun 2021 Tim APIP Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan Evaluasi Kinerja di jadwalkan pada bulan Maret 2021. sebanyak 6 SKPD yang telah mendapatkan nilai SAKIP minimal A dari 40 SKPD yang telah direncanakan pada awal Renstra.

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Instansi Pengawasan telah melakukan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) untuk tahun 2021 pada Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terdiri dari evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi :

1. Perencanaan Kinerja;
2. Pengukuran Kinerja;
3. Pelaporan Kinerja;
4. Evaluasi Kinerja; dan
5. Pencapaian Kinerja.

Dokumen yang dievaluasi yaitu dokumen Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Kinerja (LKjIP) Instansi Pemerintah serta dokumen terkait lainnya.

Ruang lingkup evaluasi adalah evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi beberapa komponen dan sub komponen :

1. Komponen Perencanaan Kinerja dengan Sub Komponen :
 - a. Rencana Strategis
 - b. Perencanaan Kinerja Tahunan
 2. Komponen Pengukuran Kinerja dengan Sub Komponen :
 - a. Pemenuhan Pengukuran
 - b. Kualitas Pengukuran
 - c. Implementasi Pengukuran
 3. Komponen Pelaporan Kinerja dengan Sub Komponen :
 - a. Pemenuhan Pelaporan
 - b. Kualitas Pelaporan
 - c. Pemanfaatan Pelaporan
 4. Komponen Evaluasi Kinerja dengan Sub Komponen :
 - a. Pemenuhan Evaluasi
 - b. Kualitas Evaluasi
 - c. Pemanfaatan Hasil Evaluasi
- Aspek Pencapaian Kinerja dengan Sub Komponen:
- a. Kinerja yang dilaporkan (output)
 - b. Kinerja yang dilaporkan (outcome)
 - c. Kinerja Tahun Berjalan (benchmark)

Metodologi yang digunakan pada evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilaksanakan instansi

dengan menggunakan teknik criteria referenced survey, dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah (step by step assessment) setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan (overall assessment) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan sebelumnya. Komponen-komponen yang dinilai adalah aspek perencanaan kinerja, aspek pengukuran kinerja, aspek pelaporan kinerja, aspek evaluasi kinerja dan aspek pencapaian kinerja.

Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu telah melakukan evaluasi atas Implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 40 SKPD terdiri dari 1 Sekretariat DPRD, 1 Sekretariat Daerah, 19 Dinas, 7 Badan termasuk Inspektorat Daerah, 1 RSUD, 1 Kantor dan 10 Kecamatan. Secara umum Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dilaksanakan dengan baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.

Hasil evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) pada 40 SKPD secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Berkatagori A (Memuaskan), berjumlah 6 SKPD
 - b. Berkatagori BB (Sangat Baik), berjumlah 32 SKPD
 - c. Berkatagori B (Baik), berjumlah 2 SKPD
- 3) Indikator “Tingkat capaian kapabilitas APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah)” telah mencapai target, dimana realisasinya sampai Level 2 (capaian sebesar 100%).

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran ke 2 (dua) yaitu Meningkatnya Kinerja pengawasan internal dengan Indikator Sasaran Ke 3 (tiga) yaitu Capaian Kapabilitas APIP.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Untuk mencapai Level Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP ada 6 (enam) elemen yang di nilai yaitu:

1. Peran Dan Layanan;

2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia;
3. Praktik Profesional;
4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja;
5. Budaya dan Hubungan Organisasi;
6. Struktur Tata Kelola

Hasil Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: SP-1644/D3/04/2019 Tanggal 04 Oktober 2019 dimana Hasil QA menyimpulkan bahwa 3 hasil penilaian dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Republik Indonesia (BPKP-RI), dimana nilai kapabilitas APIP Inspektorat daerah Kabupaten Tanah Bumbu berada pada "Level 2"

Selain analisa pencapaian tujuan dan sasaran di atas pada bab ini juga disajikan analisis pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	IKU	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	((9))	(10)	(11)	(12)	(13)
A.	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017												
A.1	Aspek Pengawasan												
1.	Persentase tindak lanjut temuan	-	v	-	85	85	85	85	77,27	-	85	85	
2.	Persentase pelanggaran pegawai	-	v	-	0,19	0,16	0,14	0,12	0,15	-	-	-	
3.	Jumlah temuan BPK	-	v	-	13	11	9	8	20	-	9	8	
B.	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020												
B.1	Indikator Kinerja Pemerintahan (Penunjang)												
1.	Maturitas system pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	-	v	-	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2	-	Level 3	Level 3	
2.	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP)	-	v	-	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 2	-	Level 3	Level 3	
3.	Opini Laporan Keuangan (Opini BPK)	-	v	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	-	WTP	WTP	
C.	Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014												
C.1	Indikator Kinerja Utama Inspektorat												
1.	Predikat SAKIP	-	-	v	A	A	A	A	A	-	A	A	
2.	Persentase SKPD yg menerima Zona Intergritas	-	-	v	7,14%	7,14%	7,14%	9,52%	16,07%	-	7,14%	9,52%	
3.	Persentase SKPD dengan Nilai SAKIP minimal "A"	-	-	v	16,67%	19,05%	21,43%	23,81%	15,00%	-	21,43%	23,81%	
4.	Capaian kapabilitas APIP	-	-	v	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 2	-	Level 3	Level 3	

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, 2021

a. Persentase Tindak Lanjut Temuan yang Diselesaikan

Penyelesaian tindak lanjut temuan dari rekomendasi yang ada pada LHP tidak semuanya bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat karena perlu proses yang lama. Pada Tahun 2021 persentase tindak lanjut temuan sebesar 77,27%. Adapun jumlah temuan pada tahun 2021 sebanyak 20 temuan terkait Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 dengan 44 rekomendasi. Pada tahun 2021 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sebanyak 34 sedangkan sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebanyak 10 rekomendasi.

Jumlah temuan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 adalah sebanyak 106 temuan, 248 rekomendasi dan 177 yang telah ditindaklanjuti. Sedangkan sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 sebanyak 71 rekomendasi atau 71,37%.

Faktor penyebab kenaikan rekomendasi yang telah ditindaklanjuti karena SKPD telah mempersiapkan dan lebih memahami tugas tindak lanjut, dan Inspektorat lebih proaktif dalam melaksanakan tugas terkait monitoring tindak lanjut temuan.

b. Persentase Pelanggaran Pegawai

Untuk persentase pelanggaran pegawai mengacu pada PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS dengan kategori pelanggaran disiplin ringan, sedang dan berat. Pada Tahun 2021 persentase pelanggaran pegawai sebesar 0,146% atau 0,15%, dimana sebanyak 6 orang yang telah melakukan pelanggaran pegawai di bagi 4.090 total PNS se- Kabupaten Tanah Bumbu. Untuk perhitungan pelanggaran disiplin pegawai di Kabupaten Tanah Bumbu data sampai per 31 Desember Tahun 2021 dengan perincian yang mendapat hukuman disiplin ringan sebanyak 0 orang, hukuman disiplin sedang sebanyak 6 orang, dan hukuman disiplin berat sebanyak 0 orang. Data pelanggaran disiplin tersebut adalah data kasus pelanggaran disiplinnya yang dilimpahkan kepada BKD untuk diproses sampai dengan dikeluarkan SK Penjatuhan Disiplin.

Adapun factor penyebab penurunan data pada tahun 2021 karena adanya pembinaan yang lebih intensif ke PNS, sehingga pelanggaran disiplin yang mengakibatkan penjatuhan hukuman disiplin berkurang. Serta adanya penurunan jumlah total ASN dari tahun sebelumnya karena ada yang mutase, pension dan meninggal.

c. Jumlah Temuan BPK

Jumlah temuan BPK pada tahun 2021 sebanyak 20 temuan. Terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya. Adapun Jumlah Temuan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 sebanyak 106 temuan.

Faktor penyebab kenaikan data temuan dan rekomendasi BPK pada tahun 2021 dikarenakan Tim Pemeriksa BPK-RI lebih bagus, lebih rinci dan lebih teliti dalam melaksanakan tugasnya.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tidak lepas dari isu- isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Inspektorat Daerah, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Secara umum kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu terhadap target yang tercantum dalam dokumen perencanaan, baik Perubahan Renja Tahun 2021 maupun Renstra Tahun 2021-2026 sudah terlaksana. Sebagian besar target yang telah ditetapkan telah tercapai, sementara ada beberapa target indikator yang belum tercapai, diantaranya adalah indikator “Tingkat Capaian Kapabilitas APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah)”.
- b. Beberapa indikator kinerja daerah yang bersifat makro belum dapat mencapai target, dalam hal ini Inspektorat Daerah perlu melakukan peningkatan pembinaan dan pengawasan dalam meningkatkan capaian tersebut, dimana hal ini berkaitan dengan kedudukan Inspektorat Daerah sebagai .Unsur Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi pengawasan, diantaranya :

- a. Masih kurangnya jumlah tenaga pengawas yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah belum seimbang rasio antara Tenaga Pengawas dengan Objek Pemeriksaan;

- b. Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan yang masih belum memenuhi Standar Pemeriksaan;
- c. Peraturan Bupati yang ada, belum sepenuhnya mengatur SOP secara Lengkap tentang tata cara pemeriksaan;
- d. Masih kurangnya dalam mengikuti bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, khususnya di Tahun 2023 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan

- 1) Mampu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, serta efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- 2) Mampu memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- 3) Mampu memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Tiga peran mutakhir intern audit di atas merupakan tantangan yang harus dijawab oleh Inspektorat selaku APIP sekaligus juga merupakan peluang dalam mengembangkan pelayanan Inspektorat .

b. Peluang

Dalam rangka menentukan strategi untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, Inspektorat selain mengandalkan kemampuan sumber daya Inspektorat, juga memiliki sejumlah peluang yang bahkan dapat menjadi dasar untuk pengembangan pelayanan tugas pembinaan dan pengawasan Inspektorat sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya dukungan peraturan perundang-undangan yang kuat sebagai dasar kewenangan Inspektorat untuk melakukan setiap kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap SKPD di pemerintahan Kabupaten

Tanah Bumbu;

- 2) Pengakuan Bupati atas peran Inspektorat dan dorongan supaya Inspektorat tidak “doing business as usual” atau bertahan dalam zona nyaman, Inspektorat harus bisa berinovasi untuk meningkatkan kemampuan dan perannya;
- 3) Sudah adanya perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan aparat penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan) dalam menangani kasus-kasus pengaduan masyarakat dan kasus- kasus berindikasi tindak pidana korupsi;

Tantangan dan Peluang tersebut harus dijadikan acuan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan lebih baik demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Tanah Bumbu.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang Terjabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu.
Pencapaian Visi dan Misi Bupati dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu beserta indikator dan targetnya. Inspektorat Daerah sebagai unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki beberapa fungsi dimana salah satunya adalah melaksanakan pengawasan internal sesuai dengan Visi dan Misi Bupati. Karena itu Inspektorat Daerah perlu memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan upaya- upaya pengkoordinasian pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026.
- b. Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan dituntut untuk berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, maupun

pemerintahan yang bersih dengan tujuan dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi meningkatnya kemampuan masyarakat.

c. Pandemi COVID-19 beserta Dampaknya

Terkait terjadinya pandemi COVID-19, Inspektorat Daerah perlu melakukan pengawasan terhadap realisasi belanja pasca Pandemi COVID-19 tahun 2022 beserta memonitoring dampak terjadinya realisasi belanja pasca Pandemi COVID-19.

d. Pengoptimalan Fungsi Kelembagaan Inspektorat Daerah

Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah perlu dilakukan pengoptimalan unsur-unsur pendukung fungsi kelembagaan, diantaranya kualitas pelayanan administrasi, kualitas sumber daya aparatur, penerapan standar dan prosedur kerja, ketersediaan sarana dan prasarana, serta tertib administrasi pelaporan kinerja dan keuangan, yaitu dengan :

- 1) Tersedianya sumber daya manusia yang bersih, berwibawa, profesional dan bertanggung jawab serta memiliki komitmen, didikasi dan komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan.
- 2) Terjalinnya koordinasi antara Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan baik internal maupun eksternal.
- 3) Terjalinnya koordinasi antara aparat pengawasan fungsional pemerintah baik intern maupun ekstern.
- 4) Terciptanya pengertian dan kemitraan dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu akan mamfaat pembinaan dan pengawasan.
- 5) Terwujudnya dukungan Sarana dan Prasarana yang menunjang operasional pengawasan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

Rancangan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Dengan demikian amat penting untuk menyusun Renja SKPD dengan

mengacu pada program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD tahun yang sama demi kemudahan administrasi, sinkronisasi dan keselarasan antar Renja SKPD dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Terkait penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023, Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu telah melakukan sinkronisasi dan koordinasi terhadap Rancangan RKPD Tahun 2023, yaitu membandingkan antara Rancangan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan perubahan indikator pada Kepmendagri 050 - 5889 tahun 2021, sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2023
Kabupaten Tanah Bumbu

Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Tanah Bumbu	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah	100 Indeks	14.767.969.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Tanah Bumbu	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah	100 Indeks	9.428.212.594	
1.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Tanah Bumbu	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terselenggara dengan baik	100 %	9.261.193.000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Tanah Bumbu	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terselenggara dengan baik	100 %	7.864.274.194	
1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Tanah Bumbu	Pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	12 Bulan	8.019.664.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 OB	7.288.493.144	
1.1.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Tanah Bumbu	Ketersediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	1.241.529.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7 Dokumen	575.781.050	
1.2	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Tanah Bumbu	Tertib Administrasi dan Disiplin Pegawai Perangkat Daerah	100 %	1.190.663.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Tanah Bumbu	Tertib Administrasi dan Disiplin Pegawai Perangkat Daerah	100 %	318.469.000	
1.2.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang tersedia	71 Stel	22.574.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	74 Paket	0	Berubahnya Volume dari Stel menjadi Paket serta bertambahnya satuan
1.2.2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	16.858.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1.380.000	Hilangnya Honor Tim Penilai

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	135 Orang	1.151.231.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	300 Orang	317.089.000	Berkurangnya Volume APIP mengikuti Diklat
1.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Tanah Bumbu	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.568.864.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Tanah Bumbu	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	710.583.400	
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	330 Buah	68.215.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	3.410.400	Ditindakan Pengadaan Penambahan Daya
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Unit	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	0 Paket	0	Menyesuaikan Anggaran dan Kebutuhan Kantor
1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Tanah Bumbu	Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Unit	141.434.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6 Paket	111.261.000	Menyesuaikan Anggaran dan Kebutuhan Kantor
1.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Tanah Bumbu	Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Bulan	52.107.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	85.857.000	Menyesuaikan Anggaran dan Kebutuhan Kantor

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	24 Eksemplar	3.057.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	24 Dokumen	2.640.000	Menyesuaikan Anggaran dan Kebutuhan Kantor
1.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	310 Kali	539.878.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	310 Laporan	492.415.000	Menyesuaikan Anggaran dan Kebutuhan Kantor
1.3.7	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Kabupaten Tanah Bumbu				Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	15.000.000	Pengelolaan Pengarsipan Ke Pihak -3
1.4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Tanah Bumbu	Persentase penyediaan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1.845.380.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Tanah Bumbu	Persentase penyediaan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	0	
1.4.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	6 Unit	1.056.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	0 Unit	0	Menyesuaikan Anggaran dan Kebutuhan Kantor
1.4.2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun	0 Unit	789.380.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	0 Unit	0	Menyesuaikan Anggaran dan Kebutuhan Kantor

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Tanah Bumbu	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100 %	363.229.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Tanah Bumbu	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	361.261.000	
1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Tanah Bumbu	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	12 Bulan	178.907.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 Laporan	129.345.000	Menyesuaikan Kebutuhan Kantor (Internet, Air dan Listrik)
1.5.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Tanah Bumbu	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	12 Bulan	58.461.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Laporan	109.845.000	Ada Peningkatan Rencana Honor Non ASN (Penjaga Malam)
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	125.861.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	122.071.000	Ada Peningkatan Rencana Honor Non ASN (Pramu Kebersihan)
1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Tanah Bumbu	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100 %	538.640.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Tanah Bumbu	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100 %	173.625.000	
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Tanah Bumbu	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	68.050.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Tanah Bumbu	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	108.471.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit	105.575.000	Khusus Kendaraan Perorangan Dinas / Jabatan menjadi Sub Kegiatan Tersendiri
1.6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi / terpelihara	0 Unit	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	0 Unit	0	Menyesuaikan Kebutuhan Pemeliharaan Kantor
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kabupaten Tanah Bumbu	Persentase rekomendasi LHP yang ditindaklanjuti	100 %	3.039.058.000	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kabupaten Tanah Bumbu	Persentase rekomendasi LHP yang ditindaklanjuti	100 %	916.820.000	
2.1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kabupaten Tanah Bumbu	Persentase laporan pengawasan internal yang diselesaikan	100 %	2.450.247.000	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kabupaten Tanah Bumbu	Persentase laporan pengawasan internal yang diselesaikan	100 %	766.265.000	
2.1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah laporan pengawasan kinerja Pemerintah Daerah	51 Laporan	268.254.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	51 Laporan	98.430.000	Menyesuaikan Anggaran Pengawasan sesuai PP 33 Tahun 2020
2.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah laporan pengawasan keuangan Pemerintah Daerah	52 Laporan	595.490.000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	52 Laporan	134.595.000	Menyesuaikan Anggaran Pengawasan sesuai PP 33 Tahun 2020
2.1.3	Reviu Laporan Kinerja	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Kinerja	5 Laporan	149.770.000	Reviu Laporan Kinerja	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	5 Laporan	171.285.000	Bertambahnya Jumlah obrik Pengawasan sesuai PKPT

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.4	Reviu Laporan Keuangan	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	56.910.000	Reviu Laporan Keuangan	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	34.215.000	Menyesuaikan Anggaran Pengawasan sesuai PP 33 Tahun 2020
2.1.5	Pengawasan Desa	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Laporan pengawasan Desa	36 Laporan	931.182.000	Pengawasan Desa	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	36 Laporan	161.625.000	Menyesuaikan Anggaran Pengawasan sesuai PP 33 Tahun 2020
2.1.6	Kerjasama Pengawasan Internal	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah laporan hasil kerjasama pengawasan internal	2 Laporan	40.021.000	Kerjasama Pengawasan Internal	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	2 Laporan	28.170.000	Menyesuaikan Anggaran Pengawasan sesuai PP 33 Tahun 2020
2.1.7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti	80 Temuan	408.620.000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK-RI dan TLHP APIP	80 Dokumen	137.945.000	Menyesuaikan Anggaran Pengawasan sesuai PP 33 Tahun 2020
2.2	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kabupaten Tanah Bumbu	Persentase laporan pengawasan dengan tujuan tertentu yang diselesaikan	100 %	588.811.000	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kabupaten Tanah Bumbu	Persentase laporan pengawasan dengan tujuan tertentu yang diselesaikan	100 %	150.555.000	
2.2.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	2 Laporan	32.477.000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah yang ditangani	2 Laporan	31.230.000	
2.2.2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah laporan pengawasan dengan tujuan tertentu	39 Laporan	556.334.000	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	39 Laporan	119.325.000	Anggaran Pengawasan sesuai PP 33 Tahun 2020
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Kabupaten Tanah Bumbu	Indeks RB Bidang Penguatan Pengawasan (Bobot)	2,8 Bobot	834.903.000	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Kabupaten Tanah Bumbu	Indeks RB Bidang Penguatan Pengawasan	2,8 Bobot	295.240.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kabupaten Tanah Bumbu	persentase kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang diterbitkan	100 %	35.000.000	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kabupaten Tanah Bumbu	persentase kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang diterbitkan	100 %	30.317.000	
3.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Kebijakan teknis di bidang Pengawasan yang diterbitkan	1 Dokumen	35.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Rekomendasi Kebijakan teknis di bidang Pengawasan yang disusun	1 Rekomendasi	30.317.000	Menyesuaikan Kebutuhan dan Anggaran Kegiatan
3.2	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Kabupaten Tanah Bumbu	Persentase asistensi dan pendampingan yang dilaksanakan	100 %	799.903.000	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Kabupaten Tanah Bumbu	Persentase asistensi dan pendampingan yang dilaksanakan	100 %	264.932.000	
3.2.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	3 Laporan	101.804.000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	41 Perangkat Daerah	46.150.000	
3.2.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Laporan)	2 Laporan	378.720.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Laporan)	41 Perangkat Daerah	60.193.000	
3.2.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Laporan)	3 Laporan	155.865.000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Laporan)	3 Laporan	139.210.000	Bertambahnya jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi dan BinteK
3.2.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (Laporan)	1 Laporan	163.514.000	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	49 Perangkat Daerah	19.370.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					18.641.930.000					10.640.272.594	

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, 2022

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Inspektorat tidak langsung berhubungan dengan usulan program, kegiatan, sub kegiatan dari masyarakat, namun tugasnya lebih kepada selaku instansi pengawas yang juga terkait dengan pelayanan masyarakat yaitu melakukan pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi, serta menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan public atau perlakuan kebijakan di pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melalui pemeriksaan khusus atau investigasi. Khusus untuk bidang pengawasan usulan-usulan tersebut tidak ada dan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2		NIHIL			
3					

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, 2022

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 adalah **“Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, dengan arahan kebijakan:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM): Kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim);
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi;
8. Pembangunan Ibukota Nusantara (IKN).

Secara rinci 8 (delapan) arah kebijakan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Arah kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan untuk peningkatan sistem jaminan sosial, modernisasi pertanian, dan pemerataan pembangunan, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar 1,5-2,0%;
 - b. Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial sebesar 91%;
 - c. Nilai Tukar Petani sebesar 103-105;
 - d. Nilai Tukar Nelayan sebesar 105-107.

Dukung terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

- MP reformasi sistem perlindungan sosial;
- MP food estate (kawasan sentra produksi pangan); dan

- MP wilayah adat Papua: wilayah adat Laa Pago dan wilayah adat Domberay.
2. Arah kebijakan peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan dilakukan untuk peningkatan sistem kesehatan dan pendidikan (sistem pendidikan dan pendidikan karakter), yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Prevelansi stunting (penduk dan sangat pendek) pada balita sebesar 17,5%;
 - b. Insidensi TB 211 per 100.000 penduduk;
 - c. Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar sebesar 71%;
 - d. Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi sebesar 43%;
 - e. Persentase sumber daya manusia (SDM) ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3 sebesar 17,48%;
 - f. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 9,24 tahun; dan
 - g. Angka partisipasi kasar Perguruan Tinggi (PT) sebesar 31,89%.
 Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
 - MP reformasi kesehatan nasional; dan
 - MP reformasi pendidikan keterampilan (pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0).
 3. Arah kebijakan penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan *decent job* dilakukan untuk penyediaan lapangan usaha, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi sebesar 43%;
 - b. Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas sebesar 48%;
 - c. Jumlah SDM bidang komunikasi dan informatika yang kompeten dan profesional sebanyak 50.000 orang; dan
 - d. Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan sebesar 60,71%.
 4. Arah kebijakan mendorong pemulihan dunia usaha dilakukan

untuk revitalisasi pariwisata dan pengembangan UMKM, yang ditandai dengan pencapaian:

- a. Pertumbuhan PDB pertanian sebesar 3,9-4,2%;
- b. Nilai devisa pariwisata sebesar US\$ 1,76-6,06 Miliar;
- c. Kontribusi PDB pariwisata sebesar 4,3%; dan
- d. Nilai tambah ekonomi kreatif sebesar Rp. 1.279 triliun.

Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

- MP destinasi pariwisata prioritas; dan
- MP pengelolaan terpadu UMKM.

5. Arah kebijakan revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dilakukan untuk industrialisasi serta riset dan inovasi, yang ditandai dengan pencapaian:

- a. Pertumbuhan industri pengolahan sebesar 5,4-5,9%;
- b. Kontribusi PDB industri pengolahan 20,6%;
- c. Produk inovasi dan produk prioritas riset nasional yang dihasilkan sebesar 10;
- d. Peringkat Global Innovation Index 75-80;
- e. Pertumbuhan PDB industri pengelolaan nonmigas sebesar 5,55-6,6,08%; dan
- f. Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas sebesar 18,80%.

Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

- MP kawasan industri prioritas dan smelter.

6. Arah kebijakan pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim) dilakukan untuk ekonomi rendah karbon dan transisi energi, yang ditandai dengan pencapaian:

- a. Persentase penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02%;
- b. Kapasitas terpasang pembangkit EBT-kumulatif sebesar 1.778,2 GW;
- c. Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan sebesar 61 perusahaan; dan
- d. Efisiensi perusahaan yang menerapkan industri hijau sebesar 6%.

Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

- MP pembangunan fasilitas pengelolaan limbah B3; dan
 - MP akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi.
7. Arah kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi dilakukan untuk penyediaan air bersih dan sanitasi, infrastruktur digital, dan infrastruktur konektivitas, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Volume tampungan air per kapita sebesar 54,50 m³/detik;
 - b. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (82,07 layak, termasuk 11,5 aman);
 - c. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak sebesar 97,5%;
 - d. Masyarakat pengguna internet sebesar 80,7%; dan
 - e. Kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik kumulatif sebesar 50%.

Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

- MP reformasi sistem kesehatan nasional;
 - MP transformasi digital;
 - MP jaringan pelabuhan utama terpadu; dan
 - MP percepatan penurunan kematian ibu dan sunting.
8. Arah kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara dilakukan untuk fasilitasi dasar di IKN, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Inisiasi pembangunan KIPP-IKN tahap 1A; dan
 - b. Luas area pembangunan Ibu Kota Negara seluas 5.600 Ha.

Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

- MP pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai pada tahun 2023, antara lain:

No	Indikator	Satuan	Target
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,3-5,9
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,3-6,0
3	Rasio Gini	Nilai	0,375-0,0378

4	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	73,29-73,35
5	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	27,02
6	Tingkat Kemiskinan	%	7,0-8,0
7	Nilai Tukar Petani/NTP	Nilai	103-105
8	Nilai Tukar Nelayan/NTN	Nilai	105-107

Pada dasarnya Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu bernaung dibawah kementerian dalam negeri seperti halnya perangkat daerah yang lain di pemerintahan daerah, akan tetapi dalam operasional Pengawasan Inspektorat Daerah lebih banyak dipengaruhi kebijakan-kebijakan yang di keluarkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal tersebut karena BPKP merupakan instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor (JFA). Kondisi ini memunculkan permasalahan karena adanya perbedaan pengawasan yang diterapkan oleh BPKP dengan standar dari Kementerian Dalam Negeri. Dengan kondisi seperti ini Inspektorat Daerah mengutamakan standar dari BPKP disamping standar yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri dengan menyesuaikan kebutuhan. Keuntungan yang diperoleh yaitu kualitas sumber daya pengawasan hasil diklat BPKP mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang setara secara nasional.

Keterkaitan inspektorat dengan program nasional secara langsung tidak ada namun dukungan secara tidak langsung dapat terlihat pada

1. Pengawasan umum dengan progress dan sasaran;
2. Pengawasan teknis dengan focus dan sasaran capaian standar pelayanan minimal dan norma, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan di daerah;
3. Pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah;
4. Menyusun rincian masing-masing fokus pengawasan berdasarkan risiko dan kebutuhan pemerintah daerah;

3.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2023

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023, tema Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 adalah **“Penguatan Sumber Daya Manusia Untuk Meningkatkan Perekonomian Berkelanjutan”**.

Tema tersebut diturunkan menjadi 4 (empat) fokus pembangunan sebagai berikut:

1. Kesehatan, Pendidikan dan Keterampilan
2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah
3. Investasi Hilirisasi Industri, Pertanian dan Pariwisata
4. Penyelesaian Pasca Banjir, Kebakaran Hutan dan Lahan Serta Dampak Covid-19.

Selanjutnya dari empat fokus pembangunan pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan tahun 2023 maka dijabarkan kedalam 6 prioritas daerah, yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia:
 - a. Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah
 - b. Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda
 - c. Penurunan Penyakit Melalui GERMAS
 - d. Pengendalian Prevalensi Stunting
 - e. Penurunan Angka Pernikahan Anak
 - f. Peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan
2. Optimalisasi Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata :
 - a. Peningkatan Nilai Tambah Daya Saing Hasil Industri, UMKM, dan Pertanian Berkelanjutan.
 - b. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja
 - c. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berbasis Geopark
 - d. Peningkatkan Jumlah dan Kelas Wirausaha baru Berbasis Digital
 - e. Peningkatan Realisasi Investasi yang berdampak ke Daerah
3. Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan dasar dan Pengembangan Perekonomian Daerah :
 - a. Pemenuhan Pencapaian Infrastruktur Dasar
 - b. Pengembangan Insfrastruktur Kewilayahan

- c. Pengembangan Kawasan Prioritas dan Pedesaan
- 4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik :
 - a. Penguatan Reformasi Birokrasi
 - b. Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender dan Inklusif
 - c. Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik
 - d. Pengembangan Satu Data Kalimantan Selatan.
- 5. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana :
 - a. Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
 - b. Pelaksanaan Mitigasi dan Pemulihan Pasca Bencana
- 6. Mewujudkan Kalsel Sebagai Gerbang Ibu Kota Negara dan Sebagai pendukung *Food Estate*, dengan:
 - a. Peningkatan Peran Kalsel sebagai Lumbung Pangan IKN
 - b. Peningkatan Konektivitas Menuju Food Estate dan IKN.

Untuk prioritas pembangunan provinsi Kalimantan selatan pada renja 2023, Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu secara tidak langsung mendukung prioritas pembangunan provinsi Kalimantan selatan yang ke 4 yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang focus pada pelayanan publik, yaitu dalam hal penguatan reformasi birokrasi.

Penyusunan dokumen RKPD Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJPD Tahun 2006-2025 dan Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2023 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2023 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tertuang dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026, yaitu **“Membangun Tanah Bumbu Maju, Unggul, Mandiri, Religius dan Demokratis”**. Sebagai upaya dalam mewujudkan Visi maka dirumuskan Misi Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Produktif dan Ber Akhlak Mulia
2. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Mantap untuk Menopang Daya Saing Pelayanan Publik dan Perekonomian

3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Arif dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
4. Mewujudkan Perekonomian Daerah Berbasis Pengembangan Potensi Maritim dan Agroindustri
5. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Sederhana dan Akuntabel.

Sedangkan rumusan tema pembangunan pada RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 adalah **“Penguatan Infrastruktur dan Ekonomi yang berkelanjutan dan Berkeadilan untuk Optimalisasi Kapabilitas Daerah Bernuansa Kearifan Lokal yang Religius”** dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, yaitu :

1. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berakhlak Mulia
2. Pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan yang bernuansa religius
3. Pembangunan Ekonomi berbasis Potensi Maritim dan Agroindustri
4. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam
5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Optimalisasi Pelayanan Berbasis Nilai-Nilai Religius.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu mendukung pencapaian misi ke 5 dan prioritas **ke 5**, yaitu **“Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Reformasi Birokrasi”**.

3.3 TUJUAN DAN SASARAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023, yaitu : **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Melayani”**.

dengan indikator tujuan “**Capaian Maturitas SPIP**”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yaitu “**Meningkatnya Kinerja Pengawasan Internal**”, dengan indikator sasaran sebagai berikut :

- 3.3.1 Persentase SKPD yang menerima Zone Integritas
- 3.3.2 Persentase SKPD dengan Nilai SAKIP Minimal A
- 3.3.3 Capaian Kapabilitas APIP

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN			
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan melayani	Capaian Maturitas SPIP	Level	3
SASARAN :			
1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase SKPD yang menerima Zona Integritas	Indeks	A
2. Meningkatkan Kinerja Pengawasan Internal	Persentase SKPD yang menerima Zona Integritas	%	7,14
	Persentase SKPD dengan Nilai SAKIP Minimal A	%	21,43
	Capaian Kapabilitas APIP	Level	3

Sumber : Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, 2021- 2026

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 serta Rancangan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Secara khusus, Inspektorat Daerah memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “Capaian Maturitas SPIP” dan indikator sasaran “Predikat SAKIP,”;
3. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
5. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
6. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, serta menyesuaikan program mandatori yang dilaksanakan setiap tahunnya. Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 adalah sebagai berikut :
 1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu pada Tahun 2023 adalah sebanyak 3 (Tiga) program, yang terdiri dari 1 (Satu) program penunjang (program pada setiap perangkat daerah), dan 2 (Dua) Program Pengawasan / Pendampingan;
 2. Jumlah Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu pada Tahun 2023 adalah sebanyak 9 Kegiatan, dan 30 Sub Kegiatan;

3. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 adalah sebesar Rp 10.640.272.594,- yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Tanah Bumbu, dengan perincian :
- a. Rp 9.428.512.594,- untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota.
 - b. Rp 916.820,- untuk Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - c. Rp. 294.940.000,- untuk Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 disertai Indikator Program dan Kegiatan serta Sumber Pendanaan tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	URUSAN PEMERINTAHAN								
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Tanah Bumbu	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah (Indeks)	83,00	9.228.212.594	APBD		83	15.453.575.000
6.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Tanah Bumbu	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terselenggara dengan baik (%)	100	7.864.274.194	APBD		100	9.724.254.000
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	52	7.288.493.144	APBD		52	8.420.648.000
6.01.02.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	7	575.781.050	APBD		7	1.303.606.000
6.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Tanah Bumbu	Tertib Administasi dan Disiplin Pegawai Perangkat Daerah (%)	100	318.469.000	APBD		100	1.250.197.000
6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	74	0	APBD		77	23.703.000
6.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1.380.000	APBD		1	17.701.000
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	60	317.089.000	APBD		90	1.208.793.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Tanah Bumbu	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100,00	710.583.400	APBD		100	1.647.309.000
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Paket)	1	3.410.400	APBD		335	71.626.000
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	9	0	APBD		55	802.382.000
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	6	111.261.000	APBD		12	148.506.000
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	2	85.857.000	APBD		2	54.713.000
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	24	2.640.000	APBD		24	3.210.000
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	310	492.415.000	APBD		316	566.872.000
6.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	12	15.000.000	APBD		12	15.000.000
6.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Tanah Bumbu	Persentase penyediaan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (%)	100	0	APBD		100	1.884.849.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan (Unit)	6	0	APBD		6	1.056.000.000
6.01.02.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan (Unit)	2	0	APBD		2	828.849.000
6.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Tanah Bumbu	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	361.261.000	APBD		100	381.393.000
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	36	129.345.000	APBD		36	187.853.000
6.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Laporan)	12	109.845.000	APBD		12	61.385.000
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	12	122.071.000	APBD		12	132.155.000
6.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Tanah Bumbu	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	100	173.625.000	APBD		100	565.573.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	12	68.050.000	APBD		12	-
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (bulan)	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	12	105.575.000	APBD		12	113.895.000
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ter rehabilitasi/terpelihara (Unit)	0	0	APBD		0	0
UNSUR PENGAWASAN									
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kabupaten Tanah Bumbu	Persentase laporan pengawasan dengan tujuan tertentu yang diselesaikan (%)	100	766.265.000	APBD		100	3.121.176.000
6.01.02.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kabupaten Tanah Bumbu	Persentase laporan pengawasan internal yang diselesaikan (%)	100	98.430.000	APBD		100	2.502.925.000
6.01.02.2.01.01.	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah laporan pengawasan kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	51	134.595.000	APBD		53	281.667.000
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah laporan pengawasan keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	52	171.285.000	APBD		55	625.265.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Kinerja (Laporan)	5	34.215.000	APBD		5	157.259.000
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Keuangan (Laporan)	1	161.625.000	APBD		1	56.910.000
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Laporan pengawasan Desa (Laporan)	36	28.170.000	APBD		36	931.182.000
6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah laporan hasil kerjasama pengawasan internal (Laporan)	2	137.945.000	APBD		2	42.022.000
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK-RI dan TLHP APIP (Dokumen)	80	150.555.000	8APBD		75	408.620.000
6.01.02.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kabupaten Tanah Bumbu	Persentase laporan pengawasan dengan tujuan tertentu yang diselesaikan (%)	100	31.230.000	APBD		100	618.251.000
6.01.02.2.02.01.	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah yang ditangani (Laporan)	2	119.325.000	APBD		2	34.100.000
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu (Laporan)	39	295.240.000	APBD		39	584.151.000
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Kabupaten Tanah Bumbu	Indeks RB Bidang Penguatan Pengawasan (Bobot)	2,8	30.317.000	APBD		2,9	874.900.000
6.01.03.2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kabupaten Tanah Bumbu	persentase kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang diterbitkan (%)	100	30.317.000	APBD		100	35.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Rekomendasi Kebijakan teknis di bidang Pengawasan yang disusun (Rekomendasi)	1	264.932.000	APBD		1	35.000.000
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Kabupaten Tanah Bumbu	Persentase asistensi dan pendampingan yang dilaksanakan (%)	100	46.150.000	APBD		100	839.900.000
6.01.03.2.02.01.	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	41	60.193.000	APBD		41	106.895.000
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	41	139.210.000	APBD		41	163.659.000
6.01.03.2.02.03.	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Laporan)	4	19.370.000	APBD		3	397.656.000
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (Perangkat Daerah)	49	9.228.212.594	APBD		49	171.690.000
			TOTAL		10.640.272.594				19.449.651.000

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, 2022

BAB V

P E N U T U P

Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 antara lain :

1. Perumusan program dan kegiatan, sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Inspektorat Daerah pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Penyusunan Renja Inspektorat Daerah ini berpedoman pada Dokumen Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026.
3. Penyusunan Renja Inspektorat Daerah ini juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Penyusunan Renja Inspektorat Daerah ini juga mendukung kegiatan mandatori baik yang dilaksanakan Kemendagri, Kemenpan-RB, KPK dan BPKP, yang tercantum pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Renja Inspektorat Daerah ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023;
2. Renja Inspektorat Daerah berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Begitu pula dalam penyusunan RKA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 untuk setiap triwulannya;
2. Pemetaan terhadap rencana program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2023 dengan mengacu pada nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selanjutnya program, kegiatan dan pada Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu.

Dengan disusunnya Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu pada Tahun Anggaran 2023.

Batulicin, 04 Juli 2022
Inspektur,

Ir. H. Riduan
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP.19630727 199203 1 007